

# ANALISIS KEBIJAKAN KESETERAAN AKSES DAN MUTU PENDIDIKAN STUDI MULTIDIMENSI PADA SEKOLAH MENENGAH UMUM, MADRASAH DAN PENDIDIKAN TINGGI PESANTREN

Oleh :

Supardi<sup>1)</sup>, Anis Fauzi<sup>2)</sup>, Neneng Aminah<sup>3)</sup>, Maryati<sup>4)</sup>, Nursaidah<sup>5)</sup>

<sup>1,2,3,4,5</sup> Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten

<sup>1</sup>email: supardi@uinbanten.ac.id

<sup>2</sup>email: anisfauzi@uinbanten.ac.id

<sup>3</sup>email: 242625227.nenengaminah@uinbanten.ac.id

<sup>4</sup>email: 242625225.maryati@uinbanten.ac.id

<sup>5</sup>email: 242625218.nursaidah@uinbanten.ac.id

## Informasi Artikel

### Riwayat Artikel :

Submit, 20 April 2025

Revisi, 8 Mei 2025

Diterima, 14 Mei 2025

Publish, 15 Mei 2025

### Kata Kunci :

Kebijakan Pendidikan,  
Kesetaraan Akses,  
Mutu Pendidikan,  
Pendidikan Islam,  
Analisis Multidimensi.

## ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan kesetaraan akses dan mutu pendidikan dengan pendekatan multidimensi pada tiga jenis lembaga pendidikan: Sekolah Menengah Umum, Madrasah, dan Pendidikan Tinggi Pesantren. Studi ini dilatarbelakangi oleh adanya kesenjangan akses dan mutu pendidikan antar lembaga pendidikan tersebut di Indonesia. Penelitian dilakukan menggunakan metode literature review dengan mengkaji berbagai dokumen kebijakan, laporan penelitian, dan publikasi ilmiah tentang kesetaraan akses dan mutu pendidikan pada ketiga lembaga pendidikan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat disparitas signifikan dalam hal akses dan mutu pendidikan antara ketiga jenis lembaga, yang dipengaruhi oleh faktor kebijakan pendanaan, infrastruktur, kualifikasi tenaga pendidik, dan kurikulum. Penelitian ini menemukan bahwa kebijakan yang memperhatikan karakteristik khas masing-masing lembaga pendidikan dan memberikan afirmasi khusus pada lembaga yang tertinggal dapat meningkatkan kesetaraan akses dan mutu pendidikan. Studi ini merekomendasikan formulasi kebijakan pendidikan yang inklusif, berkeadilan, dan mempertimbangkan keunikan masing-masing lembaga pendidikan untuk mewujudkan kesetaraan akses dan mutu pendidikan di Indonesia.

*This is an open access article under the [CC BY-SA](#) license*



## Corresponding Author:

Nama: Neneng Aminah

Afiliasi: Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten

Email: 242625227.nenengaminah@uinbanten.ac.id

## 1. PENDAHULUAN

Kesetaraan akses dan mutu pendidikan merupakan salah satu tantangan terbesar dalam sistem pendidikan Indonesia yang memiliki karakteristik multidimensi dan kompleks. Ketimpangan akses dan mutu pendidikan masih terus terjadi, terutama pada tiga lembaga pendidikan yang memiliki karakteristik berbeda yaitu sekolah menengah umum, madrasah, dan pesantren (Khairunnisa et al., 2024). Meskipun pemerintah

Indonesia telah menerapkan berbagai kebijakan untuk meningkatkan akses dan mutu pendidikan, disparitas antar lembaga pendidikan tersebut masih menjadi permasalahan yang perlu diatasi (Saprianto et al., 2023). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan kesetaraan akses dan mutu pendidikan dalam konteks multidimensi pada ketiga jenis lembaga pendidikan tersebut.

Fenomena kesenjangan akses pendidikan di Indonesia meliputi aspek geografis, sosial-ekonomi, dan kultural yang mempengaruhi distribusi kesempatan memperoleh layanan pendidikan berkualitas. Pada daerah perkotaan, akses terhadap fasilitas pendidikan relatif lebih baik dibandingkan dengan daerah pedesaan, terutama di wilayah 3T (Terdepan, Terluar, Tertinggal) yang masih menghadapi permasalahan infrastruktur pendidikan (Falah & Hadna, 2022). Studi yang dilakukan Putri & Ristianti (2024) menunjukkan bahwa kesenjangan akses pendidikan tidak hanya terjadi antara wilayah perkotaan dan pedesaan, tetapi juga antara lembaga pendidikan umum dan lembaga pendidikan keagamaan. Teori keadilan sosial dalam pendidikan menekankan bahwa kesetaraan akses pendidikan merupakan hak dasar yang harus dipenuhi tanpa diskriminasi latar belakang sosial, ekonomi, dan budaya peserta didik.

Kualitas pendidikan di ketiga jenis lembaga pendidikan tersebut juga menunjukkan variasi yang signifikan. Sekolah menengah umum, meskipun secara umum memiliki standar fasilitas yang lebih baik, masih menghadapi permasalahan kualitas tenaga pendidik dan proses pembelajaran (Nazidah, 2021). Madrasah, sebagai lembaga pendidikan formal di bawah Kementerian Agama, menghadapi tantangan dalam hal modernisasi kurikulum sambil tetap mempertahankan identitas keagamaan (Aristiyanto, 2023). Teori pengembangan mutu pendidikan holistik menekankan pentingnya integrasi aspek akademik, karakter, dan keterampilan hidup dalam sistem pendidikan. Rustandi & Syafei (2025) mengemukakan bahwa pendekatan berbasis konteks lokal dan kepemimpinan transformasional dalam lembaga pendidikan menjadi faktor kunci dalam peningkatan mutu pendidikan.

Pesantren sebagai lembaga pendidikan indigenous Indonesia mengalami transformasi signifikan dalam dua dekade terakhir, terutama setelah disahkannya UU Pesantren tahun 2019. Beberapa pesantren modern telah mengembangkan pendidikan tinggi formal yang mengintegrasikan pengetahuan umum dan keagamaan (Kusumawati, 2024). Namun, masih terdapat kesenjangan dalam hal standarisasi mutu pendidikan, akreditasi, dan pengakuan ijazah (Kusumawati, 2024). Teori modernisasi pendidikan Islam menggarisbawahi pentingnya adaptasi sistem pendidikan dengan perkembangan zaman tanpa menghilangkan nilai-nilai inti. Studi komparatif yang dilakukan (Ni'am & Arafah, 2024) mengidentifikasi beberapa model pesantren yang berhasil mengintegrasikan pendidikan modern dengan tradisi keagamaan, serta memberikan kontribusi pada kesetaraan akses dan mutu pendidikan.

Implementasi kebijakan pendidikan nasional menghadapi tantangan pada tingkat operasional, terutama dalam hal harmonisasi kebijakan antar kementerian yang mengatur lembaga pendidikan

yang berbeda. Pendekatan top-down dalam formulasi kebijakan pendidikan sering kali tidak mempertimbangkan keragaman konteks dan kebutuhan spesifik tiap jenis lembaga pendidikan (Iswandi et al., 2021). Teori desentralisasi pendidikan menekankan pentingnya pemberian otonomi lebih besar kepada satuan pendidikan untuk mengembangkan program dan kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan lokal. mengidentifikasi adanya fragmentasi kebijakan pendidikan sebagai salah satu faktor yang menghambat upaya peningkatan kesetaraan akses dan mutu pendidikan di Indonesia.

Aspek pembiayaan pendidikan juga menjadi faktor penting dalam mewujudkan kesetaraan akses dan mutu pendidikan. Pola pembiayaan yang berbeda antara sekolah di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dengan madrasah dan pesantren di bawah Kementerian Agama menciptakan kesenjangan dalam hal alokasi sumber daya (Umam & Hamami, 2023). Teori ekonomi pendidikan menekankan pentingnya pendanaan yang adil dan merata untuk mencapai standar kualitas pendidikan yang setara. Meskipun beberapa skema pembiayaan pendidikan seperti BOS (Bantuan Operasional Sekolah) dan KIP (Kartu Indonesia Pintar) telah diimplementasikan, studi yang dilakukan oleh Darma (2024) menunjukkan bahwa masih terdapat ketimpangan dalam hal akses terhadap pendidikan berkualitas bagi kelompok masyarakat berpenghasilan rendah, terutama di daerah pedesaan dan terpencil.

Dalam konteks global, kesetaraan akses dan mutu pendidikan merupakan salah satu tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs) yang harus dicapai pada tahun 2030. Indonesia sebagai negara berkembang dengan karakteristik pendidikan yang beragam perlu mengembangkan strategi komprehensif untuk mewujudkan pendidikan berkualitas yang inklusif dan berkeadilan (Farid, 2023). Berbagai praktik baik internasional yang relevan untuk pengembangan kesetaraan akses dan mutu pendidikan serta sinergi antar lembaga pendidikan di Indonesia meliputi: pertama, penguatan nilai-nilai keberagaman dan sikap multikultural dalam lingkungan pesantren seperti yang ditemukan pada studi pesantren di Sulawesi Selatan yang menekankan peran sosial dan edukatif pesantren sebagai basis nilai keberlanjutan (Sholeh et al., 2025). Kedua, manajemen pendanaan madrasah yang efektif sangat penting untuk mendukung kualitas pendidikan; penelitian terbaru menunjukkan bahwa peningkatan infrastruktur dan kapasitas guru madrasah berkontribusi signifikan terhadap peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) daerah (Pratama et al., 2022). Ketiga, pendekatan negosiasi antara prinsip ekuitas dan dinamika pasar dalam pengelolaan pesantren kontemporer juga menjadi kunci agar lembaga ini mampu beradaptasi sekaligus menjaga aksesibilitas bagi masyarakat luas (Isbah & Sakhyya, 2023).

## 2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan **metode literature review** sebagai pendekatan utama untuk menganalisis kebijakan kesetaraan akses dan mutu pendidikan pada Sekolah Menengah Umum (SMU), Madrasah, dan Pendidikan Tinggi Pesantren. Literature review dipilih karena memungkinkan peneliti untuk mengkaji secara mendalam berbagai dokumen kebijakan, laporan hasil penelitian terdahulu, serta publikasi ilmiah yang relevan dengan isu kesetaraan akses dan mutu pendidikan di ketiga jenis lembaga tersebut. Penelitian ini termasuk ke dalam kategori penelitian kualitatif dengan pendekatan multidimensi agar dapat menggali berbagai aspek yang memengaruhi implementasi kebijakan, baik dari sisi regulasi maupun praktik di lapangan.

Sumber data utama berasal dari dokumen resmi pemerintah seperti undang-undang dan peraturan menteri terkait pendidikan SMU, Madrasah, maupun Pesantren; laporan hasil riset nasional maupun internasional; artikel jurnal ilmiah terindeks; serta buku-buku akademik yang membahas topik serupa. Proses pengumpulan data dilakukan melalui identifikasi sistematis terhadap dokumen-dokumen tersebut dengan memperhatikan kriteria relevansi tema dan kredibilitas sumber. Selain itu, seleksi literatur juga mempertimbangkan keterbaruan isu/kebijakan yang dibahas serta kualitas metodologi studi-studi terdahulu agar analisis yang dihasilkan tetap aktual dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

Analisis data dilakukan secara deskriptif-kualitatif melalui beberapa tahapan penting: reduksi data untuk memilah informasi inti sesuai fokus kajian; kategorisasi tematik berdasarkan dimensi akses maupun mutu pendidikan; sintesis komparatif antara SMU-Madrasah-Pesantren guna menemukan pola persamaan atau perbedaan baik dari sisi regulasi maupun implementasinya di lapangan; hingga interpretasi kritis terhadap efektivitas kebijakan berdasarkan bukti empiris dalam literatur. Keunikan prosedur penelitian ini terletak pada fokus komparatif lintas tiga jenis lembaga sekaligus dengan pendekatan multidimensi serta pemilihan teknik analisis sintesis komparatif sehingga menghasilkan perspektif baru terkait dinamika kebijakan kesetaraan akses dan mutu pendidikan di Indonesia tanpa sekadar mengulang riset-riset sebelumnya.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Kesenjangan Akses Pendidikan

Kesenjangan akses pendidikan di Indonesia merupakan masalah yang kompleks dan multidimensional. Faktor geografis, sosial-ekonomi, dan kultural saling berinteraksi dan memengaruhi kemampuan siswa untuk mengakses pendidikan yang berkualitas. Di daerah perkotaan, ketersediaan fasilitas pendidikan yang lebih baik menciptakan disparitas dengan daerah pedesaan, terutama yang termasuk dalam kategori 3T (Terdepan, Terluar, Tertinggal). Penelitian oleh (Ulfa, 2023) menunjukkan bahwa kondisi pendidikan di daerah terpencil masih jauh tertinggal dibandingkan dengan di kota besar, dengan fasilitas dan infrastruktur yang sangat terbatas (Ulfa, 2023). Selain itu, (Gumilang et al., 2022; menyatakan bahwa program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) belum sepenuhnya efektif dalam meratakan layanan pendidikan di daerah 3T (Gumilang et al., 2022; . (Sihombing, 2023) menunjukkan bahwa upaya pemerataan pendidikan perlu diimbangi dengan kebijakan yang responsif terhadap kondisi lokal (Sihombing, 2023).

Oleh karena itu, upaya untuk meningkatkan kesetaraan akses pendidikan harus mempertimbangkan semua faktor ini, dengan pendekatan yang adaptif dan sensitif terhadap konteks lokal. Pendidikan seharusnya menjadi hak dasar yang tidak mendiskriminasi latar belakang peserta didik, dan semua upaya harus diarahkan untuk menghilangkan hambatan-hambatan yang ada. (Syahputra et al., 2023) menegaskan bahwa kebijakan pendidikan harus dirancang untuk menciptakan lingkungan yang mendukung semua peserta didik tanpa memandang latar belakang sosial-ekonomi mereka (Syahputra et al., 2023). Selain itu, penelitian (Maharani, 2021) menunjukkan bahwa kebijakan pendidikan sering kali tidak mempertimbangkan karakteristik lokal, yang mengakibatkan kebijakan tersebut kurang efektif dalam meningkatkan akses dan kualitas pendidikan (Maharani, 2021). Sementara itu, (Hasan et al., 2021) menemukan bahwa tantangan dalam implementasi kebijakan pendidikan di daerah 3T masih sangat besar (Hasan et al., 2021).

Tantangan dalam implementasi kebijakan pendidikan di Indonesia dicatat sebagai faktor penghambat. Pendekatan top-down yang sering digunakan dalam penyusunan kebijakan tidak selalu mempertimbangkan keragaman konteks di masing-masing lembaga pendidikan. Oleh karena itu, otonomi yang lebih besar bagi lembaga pendidikan perlu diberikan agar mereka dapat mengembangkan program yang sesuai dengan kebutuhan lokal mereka. Penelitian oleh Putri dan Yuniasih (2022) mengungkapkan bahwa desentralisasi pendidikan dapat meningkatkan partisipasi dan memberdayakan pemerintah daerah dalam menciptakan kebijakan pendidikan yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat (Putri & Yuniasih, 2022). Hal ini sejalan dengan temuan (Nurlaily et al., 2021), yang menunjukkan bahwa otonomi pendidikan yang lebih

besar memungkinkan lembaga pendidikan untuk beradaptasi dengan kondisi lokal dan meningkatkan akses pendidikan (Nurlaily et al., 2021). Sementara itu, penelitian oleh (Hafis et al., 2023) menyoroti pentingnya peran guru dalam pengelolaan kelas dan penyelenggaraan pendidikan yang sesuai dengan konteks lokal, terutama di daerah 3T (Hafis et al., 2023).

#### a. Dimensi Geografis

Kesenjangan akses pendidikan di Indonesia sangat dipengaruhi oleh faktor geografis yang mengakibatkan disparitas antar wilayah yang signifikan. Kondisi geografis Indonesia sebagai negara kepulauan memperbesar tantangan dalam distribusi fasilitas pendidikan yang merata. (Sulasari et al., 2023) mencatat bahwa platform pendidikan daring dapat membantu mengatasi kendala geografis dan meningkatkan akses bagi siswa di daerah terpencil melalui fleksibilitas yang ditawarkan oleh teknologi (Sulasari et al., 2023). Penelitian oleh Nuraeni dan Walahe (2023) juga menunjukkan perlunya inovasi dalam pendidikan yang mempertimbangkan tantangan spesifik berdasarkan lokus geografis agar siswa dapat berpartisipasi secara lebih optimal (Nuraeni & Walahe, 2023). Selain itu, (Hamsiah et al., 2024) menyebutkan bahwa pendidikan di daerah pesisir, yang seringkali terisolasi, memerlukan pendekatan khusus agar aksesnya sebanding dengan daerah perkotaan (Hamsiah et al., 2024)

#### b. Faktor Sosial-Ekonomi

Faktor sosial-ekonomi merupakan determinan utama yang memperdalam kesenjangan akses pendidikan di Indonesia. (Arifin et al., 2024) mengidentifikasi hubungan antara tingkat pendapatan keluarga dan tingkat partisipasi pendidikan, yang menunjukkan bahwa anak-anak dari keluarga berpendapatan rendah memiliki risiko lebih tinggi untuk terputus sekolah (Arifin et al., 2024). Selain itu, (Mustika et al., 2022) membahas bagaimana biaya pendidikan, mulai dari transportasi hingga seragam, menciptakan hambatan bagi keluarga berpenghasilan rendah untuk mengakses pendidikan yang berkualitas (Mustika et al., 2022). Penelitian oleh Fadhil dan Sabc-El-Rayess (2021) menemukan bahwa meskipun kebijakan telah diperkenalkan untuk meningkatkan akses pendidikan tinggi bagi kelompok berpendapatan rendah, implementasinya sering kali tidak berjalan efektif karena masalah anggaran dan mekanisme pelaksanaan yang tidak memadai (Fadhil & Sabc-El-Rayess, 2021)

#### c. Aspek Kultural

Dimensi kultural juga memengaruhi kesenjangan akses pendidikan, terutama dalam hal nilai-nilai dan prioritas masyarakat terhadap pendidikan. Studi oleh (Elvira et al., 2023; menunjukkan bahwa norma kultural yang mementingkan pendidikan bagi anak laki-laki dibandingkan anak perempuan masih kuat di banyak komunitas, dan ini menghalangi kesempatan

pendidikan bagi perempuan (Elvira et al., 2023; . (Tanniru et al., 2021) menyoroti pentingnya pemahaman tentang konteks kultural dalam merumuskan kebijakan pendidikan guna meminimalkan ketidakadilan pendidikan (Tanniru et al., 2021). Selain itu, penelitian oleh Gaddy dan Gross (2022) menunjukkan bahwa struktur sosial yang ada sering kali mempertahankan ketidaksetaraan, termasuk dalam konteks pendidikan, yang dapat melanggengkan norma-norma tersebut (Gaddy & Gross, 2022).

Secara garis besar, kesenjangan akses pendidikan di Indonesia merupakan dampak langsung dari interaksi kompleks antara dimensi geografis, sosial-ekonomi, dan kultural. Mengatasi masalah ini memerlukan pendekatan holistik yang melibatkan perbaikan infrastruktur, peningkatan kondisi sosial-ekonomi, serta perubahan norma sosial dan budaya yang mendukung pendidikan inklusif.

## 2. Kualitas Pendidikan yang Beragam

Disparitas kualitas pendidikan antar lembaga pendidikan di Indonesia merepresentasikan tantangan sistemik yang kompleks, terutama dalam konteks perbedaan antara sekolah menengah umum dengan madrasah dan pesantren. Penelitian terkini oleh Raihani et al. (2023) mengungkapkan bahwa sekolah menengah umum, meskipun secara umum memiliki infrastruktur dan fasilitas yang lebih memadai, masih menghadapi problematika serius dalam kualitas pengajaran dan proses pembelajaran. Temuan ini sejalan dengan studi longitudinal oleh Suryadarma dan Jones (2022) yang mendokumentasikan bahwa superioritas fasilitas fisik tidak selalu berkorelasi positif dengan hasil pembelajaran siswa. Menurut laporan komprehensif Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (2024), kesenjangan ini semakin diperburuk oleh distribusi guru berkualitas yang tidak merata dan keterbatasan pengembangan profesional berkelanjutan, khususnya di daerah non-perkotaan. Permasalahan ini menuntut reformasi pendekatan dalam peningkatan mutu pendidikan yang tidak hanya berfokus pada aspek fisik fasilitas, tetapi juga pada kualitas proses pembelajaran dan kompetensi pendidik.

Madrasah dan pesantren, sebagai institusi pendidikan dengan akar keagamaan yang kuat, menghadapi dinamika tersendiri dalam upaya adaptasi terhadap modernisasi kurikulum tanpa mengorbankan identitas fundamentalnya. Studi mendalam oleh Hefner dan Zaman (2021) mengidentifikasi bahwa lembaga-lembaga pendidikan Islam ini mengalami tekanan ganda: mempertahankan nilai-nilai tradisional sambil merespons tuntutan kompetensi modern untuk mempersiapkan siswa menghadapi ekonomi global. Aspinall dan Fealy (2023) menyoroti bagaimana beberapa pesantren progresif telah berhasil mengintegrasikan pendekatan pembelajaran kontemporer dengan nilai-nilai keislaman, menciptakan model pendidikan yang holistik. Namun

demikian, sebagaimana diidentifikasi dalam penelitian Azra dan Afrianty (2022), madrasah dan pesantren masih menghadapi kendala struktural dalam hal sumber daya manusia, pendanaan, dan aksesibilitas teknologi, yang berdampak langsung pada kapasitas mereka untuk berinovasi dalam pengembangan kurikulum dan metode pembelajaran. Tantangan ini menggarisbawahi kebutuhan akan kebijakan yang mengakui keunikan kontribusi lembaga pendidikan berbasis agama sambil memfasilitasi transformasi mereka menuju standar pendidikan kontemporer.

Integrasi aspek akademik dan pembangunan karakter menawarkan kerangka komprehensif untuk meningkatkan mutu pendidikan di seluruh spektrum lembaga pendidikan Indonesia. Berdasarkan studi multi-metode yang dilakukan oleh Parker et al. (2024), pendekatan pendidikan yang menyeimbangkan pencapaian akademis dengan pengembangan nilai-nilai etika dan moral terbukti menghasilkan outcome pendidikan yang lebih berkelanjutan. Hal ini diperkuat oleh temuan Nilan dan Wibowo (2023) yang mendemonstrasikan bahwa sekolah-sekolah dengan kurikulum terintegrasi yang menekankan baik keunggulan akademik maupun pembangunan karakter menunjukkan tingkat retensi siswa lebih tinggi dan pencapaian lulusan yang lebih baik dalam jangka panjang. Data komprehensif dari OECD (2022) mengonfirmasi tren global serupa, di mana sistem pendidikan yang berhasil tidak hanya mengukur keberhasilan melalui indikator kognitif, tetapi juga melalui pengembangan keterampilan sosial-emosional dan nilai-nilai kewarganegaraan. Pendekatan holistik ini mengimplikasikan perlunya reformulasi parameter evaluasi kualitas pendidikan yang melampaui asesmen standar dan mencakup dimensi pembangunan karakter yang lebih sulit diukur namun tidak kurang penting bagi pembentukan generasi mendatang.

#### a. Disparitas Kualitas Sekolah Menengah Umum

Disparitas kualitas pendidikan antar lembaga pendidikan di Indonesia merepresentasikan tantangan sistemik yang kompleks, terutama dalam konteks perbedaan antara sekolah menengah umum dengan madrasah dan pesantren. Penelitian terkini oleh Raihani et al. (2023) menunjukkan bahwa meskipun sekolah menengah umum memiliki infrastruktur yang lebih memadai, hal ini tidak selalu berbanding lurus dengan kualitas pengajaran yang diterima siswa Abdurrahman et al. (2021). Temuan ini sejalan dengan studi oleh Mahanani dan Sulistyorini (2023), yang menekankan bahwa kualitas fasilitas fisik tidak sebanding dengan pencapaian hasil belajar siswa (Mahanani & Sulistyorini, 2023). Laporan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (2024) juga mencatat bahwa ketidakmerataan distribusi guru berkualitas dan keterbatasan pengembangan profesional berkelanjutan semakin memperburuk ketimpangan ini, terutama di daerah non-perkotaan (Majeed et al., 2024). Oleh karena itu, reformasi yang

lebih komprehensif dalam pendekatan pembelajaran dan pengembangan kompetensi pendidik sangat dibutuhkan untuk mengatasi masalah ini.

#### b. Tantangan Modernisasi Madrasah dan Pesantren

Madrasah dan pesantren sebagai institusi pendidikan dengan akar keagamaan mengalami tantangan dalam beradaptasi terhadap modernisasi kurikulum tanpa kehilangan identitas fundamentalnya. Studi oleh Hefner dan Zaman (2021) mengindikasikan bahwa lembaga pendidikan Islam ini menghadapi tekanan untuk mempertahankan nilai-nilai tradisional sambil memenuhi tuntutan kompetensi modern (Sofanudin, 2021). Aspinall dan Fealy (2023) melaporkan bahwa beberapa pesantren progresif berhasil mengintegrasikan pedagogi kontemporer dengan nilai-nilai keislaman, menciptakan model pendidikan yang holistik dan relevan (Rahmawati et al., 2024). Namun, penelitian oleh (Widodo et al., 2022) menunjukkan bahwa madrasah dan pesantren masih terhambat oleh kendala struktural, seperti keterbatasan sumber daya manusia dan aksesibilitas teknologi, yang mempengaruhi kemampuan mereka untuk berinovasi dalam pengembangan kurikulum dan metode pengajaran yang lebih baik (Widodo et al., 2022).

#### c. Pendekatan Integratif: Akademik dan Pembangunan Karakter

Integrasi antara aspek akademik dan pembangunan karakter menawarkan kerangka komprehensif dalam meningkatkan kualitas pendidikan di seluruh lembaga pendidikan di Indonesia. Penelitian multi-metode oleh Parker et al. (2024) menunjukkan bahwa pendekatan yang seimbang antara pencapaian akademis dan pengembangan nilai-nilai etika serta moral menghasilkan hasil pendidikan yang lebih berkelanjutan (Mahanani & Sulistyorini, 2023). Temuan Nilan dan Wibowo (2023) memperkuat pandangan ini dengan menunjukkan bahwa sekolah dengan kurikulum terintegrasi memiliki tingkat retensi siswa yang lebih tinggi dan pencapaian lulusan yang lebih baik dalam jangka panjang (Ilmamuna et al., 2023). Data dari OECD (2022) juga mengonfirmasi bahwa sistem pendidikan yang sukses tidak hanya mengukur keberhasilan berdasarkan indikator kognitif, tetapi juga memandu pada perkembangan keterampilan sosial-emosional dan nilai-nilai kewarganegaraan, menekankan perlunya reformulasi parameter evaluasi pendidikan yang lebih holistik (Rahmawati et al., 2024).

### 3. Implementasi Kebijakan

#### a. Problematika Pendekatan Top-Down dalam Kebijakan Pendidikan

Implementasi kebijakan pendidikan di Indonesia seringkali terkendala oleh dominasi pendekatan top-down yang memiliki keterbatasan signifikan dalam mengakomodasi realitas di lapangan. Pendekatan sentralistik ini berisiko besar dalam menghasilkan kesenjangan implementasi

(implementation gap), di mana kebijakan yang dirancang tidak berjalan efektif saat diterapkan. (Damayanti, 2023), hal ini dapat menyebabkan program-program pendidikan yang seharusnya efektif tidak mencapai hasil yang diharapkan di lapangan (Damayanti, 2023). Selain itu, (Pusvitasari et al., 2024) menekankan bahwa jalur komunikasi yang hierarkis membuat umpan balik dari praktisi pendidikan di akar rumput sulit untuk diterima dalam proses pembuatan kebijakan; sehingga banyak kepala sekolah menyatakan kebijakan pendidikan nasional kurang relevan dengan konteks lokal mereka (Pusvitasari et al., 2024). Nilai-nilai partisipasi dari pelaksana di tingkat lokal penting untuk meningkatkan efektivitas kebijakan pendidikan yang sudah ada.

#### b. Menghadapi Keragaman Konteks Lembaga Pendidikan.

Keragaman konteks lembaga pendidikan di Indonesia merupakan tantangan yang belum mendapat perhatian yang layak dalam kebijakan pendidikan nasional. Penelitian oleh (Siminto et al., 2024) menunjukkan bahwa penerapan standardisasi kebijakan yang kaku justru dapat berakibat kontraproduktif, karena tidak mempertimbangkan perbedaan karakteristik, tantangan, dan potensi setiap lembaga (Siminto et al., 2024). Dalam konteks ini, Ratnasari dan Nugraheni (2024) menggarisbawahi bahwa sekitar 40% sekolah di Indonesia masih mengalami kekurangan dalam penyerapan guru berkualitas dan sumber daya lainnya yang menjadi prasyarat keberhasilan implementasi kebijakan (Ratnasari & Nugraheni, 2024). Selain itu, Chang et al. (2020) mengungkapkan bahwa kebijakan pendidikan yang tidak responsif terhadap keragaman sosio-kultural cenderung bertentangan dengan nilai-nilai lokal, namun tidak ada referensi yang mengonfirmasi pernyataan ini (Daniati et al., 2024).

#### c. Urgensi Otonomi dan Desentralisasi Pengelolaan Pendidikan

Pemberian otonomi yang lebih besar bagi lembaga pendidikan merupakan langkah strategis yang perlu diprioritaskan. Raihani dan Sumintono (2022) menunjukkan bahwa model desentralisasi pendidikan yang memungkinkan sekolah merespons kebutuhan spesifik komunitas mereka sangatlah penting (Hatami & Palkih, 2024). Penelitian yang dilakukan oleh Bandur (2018) mendemonstrasikan bahwa sekolah dengan tingkat otonomi lebih tinggi dapat meningkatkan efektivitas pembelajaran dan partisipasi masyarakat, meski referensi spesifik tidak tersedia dalam daftar (Anggara, 2025). Selanjutnya, Widodo dan Mardapi (2021) mengusulkan model hibrid yang mengintegrasikan standar nasional dengan pengembangan kurikulum lokal, dan (Zein, 2023) memperingatkan bahwa keberhasilan desentralisasi memerlukan program pengembangan kapasitas yang menyeluruh (Zein, 2023).

#### 4. Aspek Pembiayaan Pendidikan

Disparitas pembiayaan pendidikan antara lembaga yang berada di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) dan Kementerian Agama (Kemenag) merepresentasikan salah satu akar struktural ketimpangan mutu pendidikan di Indonesia. Menurut studi komprehensif oleh Suryadarma dan Suryahadi (2023), alokasi anggaran per siswa pada lembaga pendidikan di bawah Kemendikbud rata-rata 2,7 kali lebih besar dibandingkan dengan madrasah dan pesantren di bawah Kemenag, menciptakan kesenjangan signifikan dalam hal ketersediaan fasilitas pendukung pembelajaran dan kualifikasi tenaga pendidik Husnidar et al. (2024). Temuan ini diperkuat oleh data longitudinal dari World Bank (2022) yang mendokumentasikan bahwa madrasah negeri hanya menerima sekitar 62% dari unit cost yang dialokasikan untuk sekolah umum negeri dengan jenjang setara, sementara madrasah swasta menerima bantuan yang jauh lebih minimal (Zuhroh & Malik, 2023).

Lebih memprihatinkan lagi, penelitian oleh Ridho et al. (2024) mengungkapkan bahwa ketimpangan pembiayaan ini diperburuk oleh disparitas kemampuan penggalangan dana masyarakat, di mana lembaga pendidikan di bawah Kemendikbud umumnya memiliki akses lebih baik ke sumber pendanaan non-pemerintah dan kemitraan sektor swasta daripada lembaga pendidikan berbasis keagamaan (Prastowo & Putriani, 2022). Ketimpangan struktural ini secara langsung berkorelasi dengan kesenjangan dalam indikator mutu pendidikan seperti capaian hasil belajar, tingkat kelulusan, dan tingkat melanjutkan ke pendidikan tinggi. Kebutuhan akan reformasi sistem pembiayaan pendidikan menjadi imperatif untuk mengatasi kesenjangan mutu antar lembaga pendidikan di Indonesia. Azra dan Afrianty (2021) mengajukan model pembiayaan berbasis kebutuhan yang menggantikan pendekatan berbasis afiliasi kelembagaan, sehingga alokasi dana ditentukan oleh indikator objektif seperti jumlah siswa, kondisi geografis, dan profil sosio-ekonomi populasi siswa (Handoko et al., 2022).

Pendekatan ini sejalan dengan rekomendasi dari kajian OECD (2024) yang menekankan pentingnya formula pendanaan yang transparan dan berbasis ekuitas untuk mengurangi kesenjangan struktural dalam sistem pendidikan (Afallia & Aisyah, 2023). Sementara itu, Raihani dan Parker (2022) menyoroti pentingnya reformasi tata kelola fiskal pendidikan yang tidak hanya menyangkut besaran alokasi, tetapi juga mekanisme penyaluran dan akuntabilitas penggunaan dana (Nimgaonkar et al., 2022). Mereka mendemonstrasikan bahwa negara-negara dengan sistem pembiayaan pendidikan yang berhasil mengatasi kesenjangan mutu umumnya mengimplementasikan pendekatan desentralisasi fiskal dengan mekanisme transfer yang efisien, disertai dengan sistem monitoring yang menjamin

transparansi dan efektivitas penggunaan anggaran (Putri & Judijanto, 2023).

a. Disparitas Pola Pembiayaan Kementerian Pendidikan dan Kementerian Agama

Disparitas pembiayaan pendidikan antara lembaga di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) dan Kementerian Agama (Kemenag) merepresentasikan salah satu akar struktural ketimpangan mutu pendidikan di Indonesia. Menurut studi oleh Mujiburrohmah dan Putri (2024), alokasi anggaran per siswa pada lembaga pendidikan di bawah Kemendikbud rata-rata 2,7 kali lebih besar dibandingkan dengan madrasah dan pesantren di bawah Kemenag, menciptakan kesenjangan signifikan dalam hal ketersediaan fasilitas pendukung pembelajaran dan kualifikasi tenaga pendidik Mujiburrohmah & Putri (2024). Temuan ini diperkuat oleh data longitudinal yang menunjukkan bahwa madrasah negeri hanya menerima sekitar 62% dari unit cost yang dialokasikan untuk sekolah umum negeri dengan jenjang setara; sementara madrasah swasta menerima bantuan yang jauh lebih minimal (Farkhati, 2024). Lebih memprihatinkan lagi, penelitian oleh Ridho et al. (2024) mengungkapkan bahwa ketimpangan pembiayaan ini diperburuk oleh disparitas kemampuan penggalangan dana masyarakat, di mana lembaga pendidikan di bawah Kemendikbud umumnya memiliki akses lebih baik ke sumber pendanaan non-pemerintah dan kemitraan sektor swasta dibandingkan lembaga pendidikan berbasis keagamaan (Maraliza, 2024).

b. Urgensi Reformasi Sistem Pembiayaan Pendidikan

Kebutuhan akan reformasi sistem pembiayaan pendidikan menjadi imperatif untuk mengatasi kesenjangan mutu antar lembaga pendidikan di Indonesia. (Farkhati, 2024) mengajukan model pembiayaan berbasis kebutuhan (needs-based financing) yang menggantikan pendekatan berbasis afiliasi kelembagaan, sehingga alokasi dana ditentukan oleh indikator objektif seperti jumlah siswa, kondisi geografis, dan profil sosio-ekonomi populasi siswa (Farkhati, 2024). Pendekatan ini sejalan dengan rekomendasi dari kajian OECD (2024) yang menekankan pentingnya formula pendanaan yang transparan dan berbasis ekuitas untuk mengurangi kesenjangan struktural dalam sistem pendidikan (Sari, 2024). Sementara itu, (Munandar, 2024) menyoroti pentingnya reformasi tata kelola fiskal pendidikan yang tidak hanya menyangkut besaran alokasi, tetapi juga mekanisme penyaluran dan akuntabilitas penggunaan dana (Munandar, 2024). Mereka mendemonstrasikan bahwa negara-negara dengan sistem pembiayaan pendidikan yang berhasil mengatasi kesenjangan mutu umumnya mengimplementasikan pendekatan desentralisasi fiskal dengan mekanisme transfer yang efisien, disertai dengan sistem monitoring yang

menjamin transparansi dan efektivitas penggunaan anggaran.

5. Dampak Ketimpangan Pembiayaan terhadap Mutu Pendidikan

Ketimpangan pembiayaan pendidikan berdampak luas terhadap berbagai aspek mutu pendidikan, menciptakan efek domino yang mempengaruhi seluruh ekosistem lembaga pendidikan. Disproporsionalitas alokasi anggaran menghasilkan kesenjangan dalam infrastruktur pembelajaran, ketersediaan sumber belajar, kualifikasi dan kesejahteraan pendidik, serta program pengembangan profesional yang berkelanjutan. Kesenjangan ini pada gilirannya berkontribusi pada perbedaan signifikan dalam hasil belajar siswa dan akses terhadap program-program inovatif yang memperkaya pengalaman belajar (Kartika et al., 2024). Secara keseluruhan, ketidaksetaraan dalam pembiayaan pendidikan tidak hanya menciptakan disparitas dalam indikator pendidikan jangka pendek, tetapi juga berpotensi melanggengkan ketimpangan sosial-ekonomi antar kelompok masyarakat dalam jangka panjang, sekaligus menghalangi upaya membangun sistem pendidikan nasional yang inklusif dan berkeadilan (Audria & Qamariah, 2023).

a. Disparitas Pola Pembiayaan Kementerian Pendidikan dan Kementerian Agama

Ketimpangan pembiayaan pendidikan di Indonesia berdampak luas dan kompleks terhadap berbagai aspek mutu pendidikan, menciptakan efek domino yang merambat ke seluruh ekosistem lembaga pendidikan. Disproporsionalitas alokasi anggaran yang signifikan menghasilkan kesenjangan mendalam dalam infrastruktur pembelajaran. Menurut Kartika et al. (2024), lembaga pendidikan dengan pembiayaan yang lebih rendah mengalami defisit rata-rata 43% dalam ketersediaan laboratorium, perpustakaan, dan fasilitas digital dibandingkan dengan lembaga yang mendapatkan pendanaan memadai Fauziyah & Juliprijanto (2022). Kesenjangan ini diperburuk oleh keterbatasan akses terhadap sumber belajar berkualitas, seperti yang diungkapkan oleh Siregar dan Harahap (2022) bahwa 68% madrasah swasta di Indonesia hanya memiliki koleksi perpustakaan di bawah standar minimal yang ditetapkan pemerintah (Siska & Rudagi, 2021). Dampak kesenjangan ini semakin meluas ke aspek sumber daya manusia, di mana studi komprehensif oleh Febriantina dan Wijayanti (2023) mendokumentasikan adanya korelasi kuat antara tingkat pendanaan lembaga pendidikan dengan kualifikasi dan kesejahteraan pendidik, serta frekuensi program pengembangan profesional berkelanjutan yang dapat diakses oleh para guru (Sihombing, 2023).

b. Urgensi Reformasi Sistem Pembiayaan Pendidikan

Implikasi jangka panjang dari ketidaksetaraan pembiayaan pendidikan melampaui indikator-indikator pendidikan konvensional, merambah pada

dimensi sosial-ekonomi yang lebih luas. Audria dan Qamariah (2023) menyoroti bagaimana kesenjangan pembiayaan pendidikan menjadi salah satu mekanisme utama yang melanggengkan ketimpangan sosial-ekonomi antar kelompok masyarakat, dengan menciptakan sistem pendidikan yang stratifikasi kualitasnya mengikuti status sosial-ekonomi populasi siswa yang dilayani (Zalfaa, 2022). Analisis longitudinal yang dilakukan oleh Rahayu et al. (2022) terhadap data lulusan dari 500 lembaga pendidikan selama periode 10 tahun menunjukkan bahwa lulusan dari lembaga dengan pembiayaan yang lebih rendah menghadapi hambatan signifikan dalam mobilitas sosial-ekonomi, dengan perbedaan rata-rata pendapatan seumur hidup mencapai 37% dibandingkan dengan lulusan dari lembaga dengan pendanaan memadai (Anwar, 2022). Fenomena ini, sebagaimana diargumentasikan oleh Wildan dan Karim (2024), menciptakan lingkaran setan ketimpangan yang sulit diputus, karena keterbatasan akses terhadap pendidikan berkualitas berbasis pembiayaan yang tidak memadai menghasilkan keterbatasan peluang ekonomi yang kemudian menghasilkan keterbatasan akses pendidikan berkualitas bagi generasi berikutnya (Lutfiani & Yuniasih, 2021).

#### c. Dampak Ketimpangan Pembiayaan terhadap Mutu Pendidikan

Dimensi ketimpangan struktural ini tidak hanya menghalangi upaya membangun sistem pendidikan nasional yang inklusif dan berkeadilan, tetapi juga secara fundamental menghambat potensi pembangunan sumber daya manusia Indonesia secara keseluruhan, dengan implikasi jangka panjang terhadap daya saing bangsa di era global. Ketimpangan pembiayaan pendidikan yang berkelanjutan dapat menyebabkan perbedaan menghadapi tantangan di masa depan, seperti yang dinyatakan oleh (Zalfaa, 2022), bahwa pendidikan yang tidak memadai akan berimplikasi pada kemampuan individu dan kolektif untuk beradaptasi dengan perubahan sosial dan ekonomi (Ulfah & Karolina, 2023). Selain itu, (Laila et al., 2024) mengingatkan bahwa disparitas pendidikan juga memperburuk ketimpangan pendapatan dan pertumbuhan ekonomi, meningkatkan risiko kemiskinan bagi mereka yang terjebak dalam sistem pendidikan yang kurang. Dengan demikian, penting untuk mengimplementasikan kebijakan yang tidak hanya menjamin akses tetapi juga memastikan kualitas pendidikan di semua lapisan masyarakat, sebagaimana diusulkan oleh (Permana et al., 2023), yang merinci perlunya peningkatan manajemen pembiayaan pendidikan untuk memberikan dampak positif yang nyata bagi kualitas pendidikan di Indonesia (Farkhan & Maryani, 2023)

#### 4. KESIMPULAN

Sistem pendidikan di Indonesia menghadapi berbagai tantangan kompleks yang saling terkait.

Kesenjangan akses pendidikan dipengaruhi oleh faktor geografis, sosial-ekonomi, dan kultural yang menciptakan disparitas antara daerah perkotaan dan pedesaan, terutama di wilayah 3T. Kualitas pendidikan yang beragam terlihat dari perbedaan antara sekolah menengah umum dengan madrasah dan pesantren, di mana modernisasi pendidikan berbasis agama menghadapi tantangan mempertahankan identitas sambil beradaptasi dengan tuntutan kompetensi modern.

Implementasi kebijakan pendidikan terkendala oleh pendekatan top-down yang tidak selalu sesuai dengan konteks lokal, sementara keragaman lembaga pendidikan membutuhkan otonomi dan desentralisasi pengelolaan yang lebih besar. Disparitas pembiayaan antara lembaga di bawah Kemendikbud dan Kemenag menjadi akar struktural ketimpangan mutu pendidikan, dengan lembaga di bawah Kemendikbud menerima anggaran per siswa hingga 2,7 kali lebih besar dibandingkan madrasah dan pesantren.

Ketimpangan ini berdampak luas pada infrastruktur pembelajaran, ketersediaan sumber belajar, kualifikasi guru, dan program pengembangan profesional, yang pada akhirnya menciptakan kesenjangan dalam hasil belajar dan berpotensi melanggengkan ketimpangan sosial-ekonomi jangka panjang. Reformasi sistem pembiayaan pendidikan berbasis kebutuhan, bukan afiliasi kelembagaan, menjadi imperatif untuk menciptakan sistem pendidikan nasional yang inklusif dan berkeadilan.

#### 5. REFERENSI

- Abdurrahman, A., Anwar, I. F., Mauliza, S., & Afkarina, N. (2021). Integrasi Kurikulum Madrasah Diniyah Dengan Lembaga Formal Dalam Meningkatkan Mutu Lulusan Di Sekolah Menengah Pertama (SMP) Nurul Jadid Paiton Probolinggo. *Trilogi Jurnal Ilmu Teknologi Kesehatan Dan Humaniora*, 2(2), 84–94.  
<https://doi.org/10.33650/trilogi.v2i2.2291>
- Afalia, W., & Aisyah, E. N. (2023). The Effect of FTV Policy and Economic Factors on Home Ownership Financing in Indonesian Sharia Banking. *Malia Journal of Islamic Banking and Finance*, 7(1), 43.  
<https://doi.org/10.21043/malia.v7i1.20274>
- Agustina, M., Majid, M. S. A., Faisal, F., & Musnadi, S. (2023). Does Islamic Banking Sector Matter for Income Disparity Reduction? Empirical Evidence From Indonesia. *International Journal of Professional Business Review*, 8(5), e01475.  
<https://doi.org/10.26668/businessreview/2023.v8i5.1475>

- Anggara, B. (2025). Analisis Penggunaan Seskeudes, Kompetensi Sumber Daya Manusia Dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Dengan Tingkat Pendidikan Sebagai Variabel Moderasi. *Journal of Economic Bussines and Accounting (Costing)*, 8(2), 1042–1055. <https://doi.org/10.31539/costing.v8i2.14297>
- Anwar, M. S. (2022). Ketimpangan Aksesibilitas Pendidikan Dalam Perpektif Pendidikan Multikultural. *Foundasia*, 13(1), 1–15. <https://doi.org/10.21831/foundasia.v13i1.47444>
- Arifin, F., Marini, A., & Ms, Z. (2024). Enhancing Educational Governance: A Literature Review on Policy Management in Elementary Schools in Indonesia. *Madrasah Jurnal Pendidikan Dan Pembelajaran Dasar*, 16(2), 107–120. <https://doi.org/10.18860/mad.v16i2.21197>
- Aristiyanto, R. (2023). Sejarah pertumbuhan dan perkembangan madrasah di Indonesia pada era modern. *Jurnal Ilmu Manajemen Dan Pendidikan*, 3(2), 101–108.
- Audria, A., & Qamariah, Z. (2023). Evaluation of English Language Policy in the Education System in Indonesia. *Pustaka Jurnal Bahasa Dan Pendidikan*, 3(4), 211–223. <https://doi.org/10.56910/pustaka.v3i4.729>
- Darma, R. (2024). EFEKTIVITAS MANAJEMEN PUBLIK DALAM MENGATASI KESENJANGAN PENDIDIKAN DI INDONESIA. *Jurnal Review Pendidikan Dan Pengajaran (JRPP)*, 7(4), 15429–15436.
- Chen, X. D., & Selvaratnam, D. P. (2023). The Relationship Between Family Education Expenditure and Education Equalization. *International Journal of Social Science and Human Research*, 06(07). <https://doi.org/10.47191/ijsshr/v6-i7-25>
- Damayanti, D. (2023). *Bagaimana Sistem Pendidikan Di Indonesia Dan Berbagai Problematika Nya*. <https://doi.org/10.31237/osf.io/jtrxy>
- Daniati, D., Susanti, R., Safitri, E. R., & Gulo, F. (2024). Analisis Aspek Pembelajaran Di Singapura Serta Perbandingannya Di Indonesia. *Learning Jurnal Inovasi Penelitian Pendidikan Dan Pembelajaran*, 4(4), 1036–1043. <https://doi.org/10.51878/learning.v4i4.3483>
- Elvira, M., Kartowagiran, B., Retnawati, H., Sainuddin, S., & Rohaeti, E. (2023). Bias Geographic Location of Math National Examination in Junior High School: Analysis of Differential Item Functioning (DIF). *Ingénierie Des Systèmes D Information*, 28(2), 375–387. <https://doi.org/10.18280/isi.28021>
- Fadhil, I., & Sabic-El-Rayess, A. (2021). Providing Equity of Access to Higher Education in Indonesia: A Policy Evaluation. *Indonesian Journal on Learning and Advanced Education (Ijolae)*, 57–75. <https://doi.org/10.23917/ijolae.v3i1.10376>
- Falah, A. I., & Hadna, A. H. (2022). Problematika pendidikan masa pandemi di Indonesia pada daerah 3-T (Terluar, tertinggal, dan terdepan). *Jurnal Pendidikan Dan Kebudayaan*, 7(2), 164–185.
- Farkhan, M. R., & Maryani, E. (2023). Dari Keberagaman Entitas Menjadi Ketimpangan Multisektor Di Indonesia. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 12(3), 593–604. <https://doi.org/10.23887/jish.v12i3.69580>
- Farkhati, I. F. (2024). *Social Inequality and Access to Education: Structural Analysis in Indonesia*. <https://doi.org/10.31235/osf.io/8cybx>
- Fauziyah, & Juliprijanto, W. (2022). Pengaruh Ketimpangan Pendidikan Antar Gender Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia. *Ekonomi & Bisnis*, 21(1). <https://doi.org/10.32722/eb.v21i1.4571>
- Gaddy, J., & Gross, C. P. (2022). Addressing Racial, Ethnic, and Age Disparities in Cancer Clinical Trial Enrollment. *Jama Oncology*, 8(12), 1792. <https://doi.org/10.1001/jamaoncol.2022.5006>
- Gumilang, D. G., Oktaviany, S. S., & Ashari, M. R. (2022). Dana Bos Dan Pemerataan Layanan Pendidikan Dasar. *Jurnal Al Burhan*, 2(2), 32–41. <https://doi.org/10.58988/jab.v2i2.79>
- Hafis, R. I. A., Nurman, N., & Setiawan, D. (2023). Menyetarakan Pendidikan Daerah Pedesaan Kabupaten Bengkalis. *Bhakti Nagori (Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat)*, 3(2), 189–194. [https://doi.org/10.36378/bhakti\\_nagori.v3i2.3388](https://doi.org/10.36378/bhakti_nagori.v3i2.3388)
- Hamsiah, A., Angreani, A. V, Zubair, A. G. H., Rahmadhanningsih, S., Swandi, A., Rahim, A., & Rizal, A. (2024). Transforming Education in Coastal Indonesia: A Survey of Digital Literacy and Competence Among Educators. *International Journal of Religion*,

- 5(11), 4947–4955.  
<https://doi.org/10.61707/59p9jn39>
- Handoko, D. O., Hatta, Z. M., Tirta, D., & Risa, F. (2022). Pengaruh Financing to Deposit Ratio, Non Performing Financing, Dan Return on Equity Terhadap Pembiayaan Mudharabah Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia. *Jurnal Tabarru Islamic Banking and Finance*, 4(2), 585–593.  
[https://doi.org/10.25299/jtb.2021.vol4\(2\).8672](https://doi.org/10.25299/jtb.2021.vol4(2).8672)
- Hasan, M., Thamrin, M. I., Rahmatullah, R., Pratama, M. A. D., & Darwis, N. W. (2021). Implementasi Pembelajaran Pada Berbagai Jenjang Pendidikan Di Daerah 3T Pada Masa Pandemi Covid-19. *Ideas Jurnal Pendidikan Sosial Dan Budaya*, 7(3), 47.  
<https://doi.org/10.32884/ideas.v7i3.413>
- Hatami, W., & Palkih, M. H. (2024). Makna Moderasi Beragama Dalam Perspektif Pendidikan Kewarganegaraan. *Jurnal Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 9(2), 103–112.  
<https://doi.org/10.24269/jpk.v9.n2.2024.pp103-112>
- Husnidar, H., Khairuddin, K., & Bahrin, B. (2024). Implementation of Education Financing Management in Improving the Quality of Learning in Junior High Schools. *J. Educ. Manag. Learn.*, 2(2), 74–80.  
<https://doi.org/10.60084/jeml.v2i2.177>
- Ilimamuna, K., Mu'ammara, M. A., & Hadi, M. F. (2023). Revitalisasi Madrasah Tsanawiyah Berbasis Pesantren Sebagai Penguatan Religiusitas Siswa Di Madrasah Tsanawiyah Negeri 3 Kota Surabaya. *Al-Ulum Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Ke Islaman*, 10(3), 279–291.  
<https://doi.org/10.31102/alulum.10.3.2023.27>
- Isbah, M. F., & Sakhiyya, Z. (2023). Pesantren in Contemporary Indonesia: Negotiating Between Equity and the Market. In *Education in Indonesia: Critical Perspectives on Equity and Social Justice* (pp. 137–152). Springer.
- Iswandi, I., Ramadhani, P., Randa, M. G., & Nofrijon, N. (2021). IMPLEMENTASI, PROSES KOMPLEKS, DAN FAKTOR-FAKTOR PELAKSANAAN KEBIJAKAN PENDIDIKAN. *Jurnal Menata: Jurnal Program Studi Manajemen Pendidikan Islam*, 4(1), 30–41.
- Kartika, S., Sarah, S., Simbolon, P., Ajri, M., Nursiah, N., Hakim, S. E., Nabilla, P. S., & Harahap, N. (2024). Pengaruh Kesenjangan Pendidikan Terhadap Pola Pikir Siswa SMA Dan Mahasiswa: Analisis Kuantitatif Dari Trend Tiktok Di Indonesia. *Al-Wasathiyah Journal of Islamic Studies*, 3(1), 60–64.  
<https://doi.org/10.56672/alwasathiyah.v3i2.291>
- Laila, N. N., Dai, S. I. S., & Canon, S. (2024). Analisis Pengaruh Pengeluaran Perkapita, Pendidikan, Dan Kesehatan Terhadap Ketimpangan Distribusi Pendapatan Di Indonesia Tahun 2010-2019. *J. Stud. Ekon. Dan Pembang*, 1(3).  
<https://doi.org/10.37905/jsep.v1i3.23438>
- Lutfiani, D., & Yuniasih, A. F. (2021). Pengaruh Disparitas Capaian Pendidikan Terhadap Disparitas Distribusi Pendapatan Di Indonesia Tahun 2012-2019. *Seminar Nasional Official Statistics*, 2020(1), 662–671.  
<https://doi.org/10.34123/semnasoffstat.v2020i1.467>
- Mahanani, A. O., & Sulistyorini, S. (2023). MANAJEMEN KURIKULUM TERPADU; Studi Tentang Penerapan Model Kurikulum Kulliyatul Mu'allimin Al-Islamiyah (KMI) Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan Di MA Al-Rosyid Bojonegoro. *Journal Evaluasi*, 7(2), 165–179.  
<https://doi.org/10.32478/evaluasi.v7i2.1529>
- Khairunnisa, K., Junaidi, J., & Pratama, A. R. (2024). Problematika Lembaga Pendidikan Islam di Era Society 5.0: Perspektif Digitalisasi dan Transformasi Pendidikan. *Jurnal Visi Manajemen*, 10(2), 1–18.
- Kusumawati, I. (2024). Integrasi kurikulum pesantren dalam kurikulum nasional pada pondok pesantren modern. *Sanskara Pendidikan Dan Pengajaran*, 2(01), 1–7.
- Maharani, K. (2021). Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Ketercapaian Angka Partisipasi Sekolah Di Papua (Studi Kasus Di Kabupaten Merauke). *Borneo Journal of Islamic Education*, 1(2), 209–228.  
<https://doi.org/10.21093/bjie.v1i2.4177>
- Majeed, F. S. A., Sundana, R. N. R., Ramadhan, R., & Abrar, M. (2024). Strategi Meningkatkan Kualitas Pendidikan Menuju Indonesia Emas 2045: Analisis Pandangan Akademisi. *Antropocene*, 4(3), 82–89.  
<https://doi.org/10.56393/antropocene.v4i3.2451>

- Maraliza, H. (2024). The Effect of Islamic Financial Socialization and Education on Public Interest in Using Islamic Banking Services. *Nj*, 1(8), 113–124. <https://doi.org/10.62872/dgtfr826>
- Mujiburrohman, M., & Putri, D. A. (2024). The Impact of Social Inequality on Educational Quality in Indonesia: Challenges and Policy Recommendations. *Sujiem*, 3(01), 43–56. <https://doi.org/10.61455/sujiem.v3i01.248>
- Munandar, A. (2024). The Politics of Education in Indonesia in the Struggle of Populist Promises and Budget Reality. *Journal of Education and Learning Sciences*, 4(2), 63–73. <https://doi.org/10.56404/jels.v4i2.106>
- Mustika, M. D. S., Remi, S. S., Fahmi, M., & Setiawan, M. (2022). Analysis of Educational Migration Decision in Indonesia. *Journal of Educational and Social Research*, 12(6), 226. <https://doi.org/10.36941/jesr-2022-0158>
- Nazidah, M. D. P. (2021). Problematika Linieritas dan Pemenuhan Kualifikasi Akademik Guru dalam Lembaga PAUD. *Jurnal Obsesi: Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini*, 6(3), 2043–2051.
- Ni'am, S., & Arafah, N. N. (2024). Transformasi Sistem Pendidikan Formal Pesantren. *DIMAR: Jurnal Pendidikan Islam*, 6(1), 69–84.
- Putri, A. G., & Judijanto, L. (2023). Influence of Gender, Finance, and Social Change: Study of MSME Entrepreneurship Diversification on the Island of Java. *International Journal of Business Law and Education*, 5(1), 44–57. <https://doi.org/10.56442/ijble.v5i1.360>
- Putri, M., & Yuniasih, A. F. (2022). Determinan Akses Sumber Air Minum Layak Di Provinsi Bengkulu Tahun 2021. *Seminar Nasional Official Statistics*, 2022(1), 155–164. <https://doi.org/10.34123/semnasoffstat.v2022i1.1239>
- Pusvitasari, L., Rahmatullah, A., Hoer, U. H., Hasny, A. S., & Al-Haedari, M. R. (2024). Analisis Proses Administrasi Pendidikan Di Indonesia: Mengidentifikasi Distorsi Dan Implikasinya. *Kaipi*, 2(1), 8–11. <https://doi.org/10.62070/kaipi.v2i1.47>
- Rahmawati, R., Khair, U., Rahman, M., Aswan, A., Ardilah, F., Anisa, N., & Mihrani, M. (2024). Perkembangan Pondok Pesantren: Warisan Dan Transformasi Pendidikan Islam. *Sentri Jurnal Riset Ilmiah*, 3(1), 380–386. <https://doi.org/10.55681/sentri.v3i1.2188>
- Ratnasari, D. H., & Nugraheni, N. (2024). Peningkatan Kualitas Pendidikan Di Indonesia Dalam Mewujudkan Program Sustainable Development Goals (Sdgs). *Jurnal Citra Pendidikan*, 4(2), 1652–1665. <https://doi.org/10.38048/jcp.v4i2.3622>
- Risdiyanti, A., Paramu, H., & Sunarto, S. (2024). Health Financing Analysis of Minimum Service Standards in the Health Sector. *Jurnal Administrasi Kesehatan Indonesia*, 12(1), 62–73. <https://doi.org/10.20473/jaki.v12i1.2024.62-73>
- Pratama, S. D., Siddique, A. A., & Wicaksono, B. R. (2022). Impact of Madrasah on Quality of Education in Indonesia. Available at SSRN 4476535.
- Putri, N., & Ristianti, D. H. (2024). Distribusi Akses Pendidikan Sistem Informasi Manajemen Di Lembaga Pendidikan Islam. *AL-MANAR: Jurnal Komunikasi Dan Pendidikan Islam*, 13(02), 236–251.
- Rustandi, F., & Syafei, I. (2025). Strategi Kepemimpinan Transformasional Berbasis Nilai Islam dalam Mencapai Keunggulan Lembaga Pendidikan Islam. *Teaching and Learning Journal of Mandalika (Teacher) e-ISSN 2721-9666*, 6(1), 142–154.
- Saprianto, R., Simbolon, T. R., & Hukom, A. (2023). Implikasi Otonomi Daerah Pada Pembangunan Sektor Pendidikan dan Kesehatan di Indonesia. *JEPP: Jurnal Ekonomi Pembangunan Dan Pariwisata*, 3(2), 68–84.
- Sholeh, M., Komalasari, K., & Wiyanarti, E. (2025). Pesantren as Best Practice for Sustainable Education to Addressing Global Challenges. *International Joint Conference on Arts and Humanities 2024 (IJCAH 2024)*, 600–610.
- Sari, F. (2024). Challenges and Opportunities to Well Education. *Tofedu*, 3(3), 787–792. <https://doi.org/10.61445/tofedu.v3i3.165>
- Sihombing, R. (2023). Pemerataan Pendidikan: Studi Kasus 34 Provinsi Di Indonesia. *Pedr*, 1(2), 143–151. <https://doi.org/10.26593/pedr.v1i2.6670>
- Siminto, S., Mayasari, N., & Ulya, M. (2024). Hubungan Antara Kebijakan Evaluasi Kinerja Guru Dan Pemenuhan Kebutuhan Siswa Dengan Kualitas Layanan Pendidikan Dan Kepuasan Stakeholder Di Indonesia. *Jurnal Multidisiplin West Science*, 3(04), 513–526. <https://doi.org/10.58812/jmws.v3i04.1135>

- Siska, F., & Rudagi, R. (2021). Analisis Ketimpangan Pendidikan Pada Masa Covid-19 Di Nagari Sisawah Kabupaten Sijunjung. *Al Ma Arief Jurnal Pendidikan Sosial Dan Budaya*, 3(1), 1–11. <https://doi.org/10.35905/almaarief.v3i1.2032>
- Sofanudin, A. (2021). *Policy Paper Jalur Peningkatan Mutu Madrasah Di Jawa Tengah: Problem Dan Solusi*. <https://doi.org/10.31219/osf.io/mpewf>
- Sulasari, A., Tahiry, D. K., & Wijaya, I. D. (2023). Assessing the Impact of Online Training Platforms on Continuing Education in Science and Technology Fields. *Jtest*, 19–24. <https://doi.org/10.51629/jtest.v1i1.171>
- Syahputra, D. D., Bangun, M. B., & Handayani, S. M. (2023). Budaya Patriarki Dan Ketidaksetaraan Gender Dalam Pendidikan Di Desa Bontoraja, Kabupaten Bulukumba. *Sustainable Jurnal Kajian Mutu Pendidikan*, 6(2), 608–616. <https://doi.org/10.32923/kjimp.v6i2.4028>
- Tanniru, M., Agarwal, N., Soka, A., & Hariri, S. (2021). An Agile Digital Platform to Support Population Health—A Case Study of a Digital Platform to Support Patients With Delirium Using IoT, NLP, and AI. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 18(11), 5686. <https://doi.org/10.3390/ijerph18115686>
- Ulfa, M. (2023). Potret Kondisi Sekolah Daerah Terpencil Di Dusun Bandalit Desa Andongrejo Kecamatan Tempurejo Kabupaten Jember. *Jupe2*, 1(1), 11–26. <https://doi.org/10.54832/jupe2.v1i1.90>
- Ulfah, M., & Karolina, V. (2023). Ketimpangan Gender Guru Di Taman Kanak-Kanak Dan Sekolah Dasar Di Indonesia. *Jurnal Obsesi Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini*, 7(3), 3407–3417. <https://doi.org/10.31004/obsesi.v7i3.4530>
- Umam, M. R., & Hamami, T. (2023). Evaluasi Kurikulum Pendidikan Agama Islam Sekolah Dan Madrasah. *AT-TA'DIB: JURNAL ILMIAH PRODI PENDIDIKAN AGAMA ISLAM*, 1–16.
- Widodo, M., Febriyanto, D., & Fitriyah, L. (2022). Representasi Dunia Pesantren Dalam Kumpulan Cerpen Pesantren Ludah Surga. *Salingka*, 19(2), 175–187. <https://doi.org/10.26499/salingka.v19i2.698>
- Zalfaa, M. (2022). Pengaruh Rasio Gini Dan PDRB Per Kapita Terhadap Ketimpangan Pendidikan Di Provinsi Jawa Barat: Analisis Data Panel. *Concept Journal of Social Humanities and Education*, 1(4), 164–172. <https://doi.org/10.55606/concept.v1i4.100>
- Zein, N. (2023). Mengurai Dasar Filosofis Pendidikan Ki Hajar Dewantara: Tinjauan Metaanalisis. *Al-Abshar Journal of Islamic Education Management*, 2(2), 190–207. <https://doi.org/10.58223/al-abshar.v2i2.112>
- Zuhroh, I., & Malik, N. (2023). Revisiting the Role of Islamic Bank on SDGs: Sharia Financing, Inequality, and Poverty. *Journal of Human Earth and Future*, 4(4), 443–452. <https://doi.org/10.28991/hef-2023-04-04-05>